



# **PERJANJIAN KINERJA PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2023**

**NOMOR : PR.00/S-336/PW14/6/2023**

**TANGGAL : 8 FEBRUARI 2023**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN  
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani, Pontianak 78124  
Telepon (0561) 712427 Faksimile (0561) 712428 E-mail: kalbar@bpkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayi Riyanto  
Jabatan : Kepala Perwakilan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Muhammad Yusuf Ateh  
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001

Jakarta, 8 Februari 2023

Pihak Pertama,

Ayi Riyanto  
NIP 19700818 199103 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

1	SASARAN KEGIATAN	2	TARGET	
			3	4
			Satuan	Jumlah
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	1,070
		1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	136,270
		1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rp (Juta)	56,684
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	Persen	85.00
		2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas	2
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen	80.00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	BUMD	1
		4.2 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	7
		4.3 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	2
		4.4 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	50
		4.5 Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa	BUMDes	60
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	Persen	100.00
		5.2 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/ Ditindaklanjuti	Persen	85.00
		5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	3
		5.4 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	1
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	1
		6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	13
		6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Provinsi	1
		6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	13


SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	6.5 Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/Kota	5
	6.6 Jumlah Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	3
	6.7 Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel	Desa	25
	6.8 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	Desa	25
	6.9 Jumlah BLU/D dengan MRI $\geq$ Level 3	BLU/D	3
	6.10 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Santuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3	BUMD	1
	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	75
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	82
	7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	70.00
	7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100.00
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks	75
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks	95
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks	80

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp. 3,856,368,000.00
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp. 20,146,532,000.00
Jumlah	Rp. 24,002,900,000.00

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001

Jakarta, 8 Februari 2023  
Kepala Perwakilan,

  
Ayi Riyanto  
NIP 19700818 199103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023  
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			Satuan	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/ Daerah	1.1 Nilai Optimalisasi Penerimaan Daerah yang Terealisasi	Rp (Juta)	0	214	428	428	1,070
		1.2 Nilai Efisiensi Pengeluaran Negara dan Daerah	Rp (Juta)	0	27,254	54,508	54,508	136,270
		1.3 Nilai Penyelamatan Keuangan Negara dan Daerah	Rp (Juta)	0	11,337	22,674	22,674	56,684
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	2.1 Persentase Hambatan Pelaksanaan Pembangunan yang Diselesaikan	Persen	0.00	20.00	20.00	45.00	85.00
		2.2 Jumlah Kegiatan Pembangunan Prioritas Daerah yang Diawasi	Kegiatan Prioritas	0	0	1	1	2
3	Meningkatnya Kesadaran perbaikan tata kelola pemerintahan pada K/L/D/BU yang menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP	3.1 Persentase Rekomendasi Strategis yang Ditindaklanjuti	Persen	0.00	20.00	20.00	45.00	85.00
4	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	4.1 Jumlah BUMD dengan Pengelolaan Korporasinya Baik	BUMD	0	0	0	1	1
		4.2 Jumlah BUMD dengan Kinerja Sehat	BUMD	0	2	4	7	7
		4.3 Jumlah BLUD dengan Kinerja Sehat	BLUD	0	0	1	1	2
		4.4 Jumlah BUMDes yang Mampu Menyusun Laporan	BUMDes	0	10	25	50	50
		4.5 Jumlah BUMDes yang Memberikan Kontribusi pada Perekonomian Desa	BUMDes	0	15	40	60	60
5	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	5.1 Persentase Hasil Pengawasan Represif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	Persen	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
		5.2 Persentase Hasil Pengawasan Preventif dan Edukatif yang Dimanfaatkan/Ditindaklanjuti	Persen	0.00	20.00	25.00	40.00	85.00
		5.3 Jumlah Pemda dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Pemda	0	0	1	3	3
		5.4 Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Pengendalian Korupsi Baik	Badan Usaha	0	0	0	1	1
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1 Jumlah APIP Provinsi dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	1	0	0	0	1
		6.2 Jumlah APIP Kabupaten/Kota dengan Kapabilitas APIP $\geq$ Level 3	APIP	10	0	0	13	13
		6.3 Jumlah Provinsi dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Provinsi	1	0	0	0	1
		6.4 Jumlah Kabupaten/Kota dengan Maturitas SPIP $\geq$ Level 3	Kab/Kota	11	0	0	13	13
		6.5 Jumlah Kab/Kota dengan MRI $\geq$ Level 3	Kab/Kota	0	0	2	5	5
		6.6 Jumlah Pemda yang Akuntabel Dalam Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Daerah	Pemda	0	0	1	3	3
		6.7 Jumlah Desa yang Pengelolaan Keuangannya Akuntabel	Desa	0	5	5	15	25
		6.8 Jumlah Desa yang Menerapkan Pengelolaan Aset Desa Secara Memadai	Desa	0	5	5	15	25
		6.9 Jumlah BLU/D dengan MRI $\geq$ Level 3	BLU/D	0	1	2	3	3
		6.10 Jumlah BUMD dengan Kapabilitas Santuan Pengawasan Intern $\geq$ Level 3	BUMD	0	0	0	1	1

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
		Satuan	Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
7 Meningkatkan Kualitas Tata Kelola	7.1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor	0	0	0	75	75
	7.2 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor	0	0	0	82	82
	7.3 Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	Persen	0.00	15.00	25.00	30.00	70.00
	7.4 Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	0.00	25.00	25.00	50.00	100.00
	7.5 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Unit Kerja	Indeks	0	0	0	75	75
	7.6 Skor IKPA Unit Kerja	Indeks	0	0	0	95	95
	7.7 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja	Indeks	0	0	0	80	80

Kegiatan	Anggaran
1. Pengawasan Pembangunan di Perwakilan	Rp. 3,856,368,000.00
2. Pelaksanaan Dukungan Manajemen	Rp. 20,146,532,000.00
Jumlah	Rp. 24,002,900,000.00

Kepala BPKP,

Muhammad Yusuf Ateh  
NIP 19640809 198503 1 001

Jakarta, 8 Februari 2023  
Kepala Perwakilan,

  
Ayi Riyanto  
NIP 19700818 199103 1 002

